

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditor independen ialah merupakan suatu akuntan publik yang bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial maupun non komersial, (Carolita, 2012). Profesi auditor yang merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar pendidikan tertentu. Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan keputusan ekonomi. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya, memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar memutuskan alokasi sumber – sumber ekonomi. Seorang akuntan juga bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi – manipulasi keuangan, (Carolita, 2012).

Profesi akuntan publik merupakan jabatan kepercayaan masyarakat umum, maka akuntan publik dituntut tidak boleh memihak kepada siapapun dan jujur seperti yang dinyatakan dalam Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang berhubungan dengan penugasan independensi auditor harus dipertahankan (IAI, SPAP, 2011). Sehingga independensi merupakan aspek yang sangat penting dari profesi akuntan publik, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi penilaian (akreditasi) atas laporan keuangan. Menurut Atika (2018) independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Tidak ada dalam profesi lain bahwa sikap tidak memihak sedemikian penting selain dalam auditing. Auditor menyediakan informasi yang sangat penting kepada pemegang saham dan pemegang kepentingan lainnya untuk perusahaan yang dimiliki publik.

Menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Selain standar – standar yang harus ditaati, akuntan publik dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien dan pihak ketiga dengan cara mempertahankan independensinya. Sering terjadi benturan – benturan dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan sisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu harus dapat mempertahankan sikap independen. Semakin memburuknya independensi auditor akhir – akhir ini menjadi penyebab terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi diberbagai perusahaan publik (Sukamdani, 2016).

Apabila seorang auditor independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *America Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Meskipun integritas dan objektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Namun saat ini

masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan seorang akuntan publik terlebih masalah independensi. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun.

Komite audit merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit di Indonesia dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus – kasus keuangan terutama kasus independensi akuntan publik. Komite audit ternyata juga membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peraturan tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang terdaftar pada BEJ harus memiliki komite audit.

OJK juga telah memberikan sanksi bagi 3 kantor akuntan publik sepanjang 2019. Pada laporan keuangan tahun buku 2018 itu, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terbukti mempercantik laporan keuangan Garuda Indonesia, dari semula menderita kerugian menjadi untung. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sanksi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan Akuntan Publik Kasner Sirumapea, yang

merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Kasner dinilai melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). (<https://economy.okezone.com/>)

Sedangkan untuk kasus independensi auditor yang ada disumbagsel adalah kasus di Riau KAP Sinuraya pada tahun 2014 yang melakukan audit diluar kewenangan memeriksa perkebunan kelapa sawit yang diagunkan ke BNI 46 Cabang Pekanbaru sebagai agunan kredit. Pada kota Bandar Lampung adalah dua auditor BPK atas nama Welly dan Ahmad Gozali, kedua nya membantu mantan bendahara khusus Kejati Lampung terkait penerimaan negara dari sektor bukan pajak sebesar Rp 1,4 miliar atas penyetoran uang tilang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tahun 2011-2013. Oleh karena itu, kasus-kasus manipulasi tersebut membuat profesi akuntan publik menjadi sorotan. Para pemakai laporan keuangan mulai ragu terhadap profesi akuntan publik. Sebagai pihak independen, seharusnya auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. seorang auditor harus mempunyai sikap independensi, tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi, dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dan ingkar dari tanggungjawab terhadap profesi maupun masyarakat. Serta seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi yang sesuai dengan faktor-faktor independensi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Setyono (2016) berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa variabel lamanya *audit fee*, kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor, sedangkan persaingan antar KAP tidak berpengaruh terhadap independensi auditor. Penelitian yang dilakukan Abadi (2011) efektivitas komite audit dan komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi akuntan publik, sedangkan *tenure of the audit firm* dan persaingan antar kantor

akuntan publik tidak berpengaruh terhadap independensi akuntan publik. Sedangkan Malsi (2015) lamanya hubungan audit dengan klien dan besarnya *audit fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukamdani (2016) menyatakan bahwa Ukuran kantor akuntan publik, *Fee Audit*, Lamanya Hubungan dengan klien, Komitmen profesional terbukti berpengaruh positif terhadap independensi kantor akuntan publik. Tetapi persaingan antar kantor akuntan terbukti tidak berpengaruh terhadap independensi kantor akuntan publik. Penelitian yang dilakukan Setyono (2016) variabel lamanya penugasan audit, ukuran KAP, audit *fee*, kompetensi auditor dan pendidikan auditor, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Atika (2018) dengan judul Pengaruh efektivitas komite audit, komitmen profesional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik. Saran dari penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian Atika (2018) adalah terletak pada penambahan variabel *Audit fee* (Sukamdani, 2016) dan penyebaran kuisioner atau studi kasus pada KAP se - Sumbagsel. Pengambilan variabel audit *fee* adalah dengan dipertimbangkannya biaya audit, maka secara logika auditor akan bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku dengan, dan kinerja auditor akan semakin baik, hal inilah yang mendasari bahwa besarnya audit *fee* akan meningkatkan independensi auditor.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT, KOMITMEN PROFESIONAL, TENUR KANTOR AKUNTAN PUBLIK, PERSAINGAN ANTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AUDIT *FEE* TERHADAP INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik se – Sumatera Bagian Selatan.
2. Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenure Kantor Akuntan Publik Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik dan Audit *fee*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
2. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
3. Apakah tenure kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
4. Apakah persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?
5. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah efektivitas komite audit berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah tenure kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.

5. Untuk membuktikan secara empiris apakah audit *fee* berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan mengenai pengevaluasian kinerja organisasi.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bahan informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja akuntan publik.
3. Bagi Akademis, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya tentang independensi akuntan publik, khususnya tentang variabel yang berpengaruh terhadap independensi akuntan publik se – Sumatera Bagian Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan saran serta keterbatasan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.